

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENUJU SMART CITY

Lalu Rizky Rasyid Fahreza
NPP. 31.0746

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : kreza1705@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikra Novar Rizqi, M.T

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study aims to analyze the readiness of the Lombok Tengah Regency Government in moving towards a Smart City through smart governance. A Smart City is a concept that encourages local governments to use information and communication technology to improve the efficiency of public services and the quality of life of the community. In this context, the Lombok Tengah Regency Government needs to evaluate the readiness of its structure, infrastructure, and superstructure to support the implementation of a Smart City. **Objective:** The objective of this study is to assess the preparedness of the Lombok Tengah Regency Government for transitioning to a Smart City by examining the organizational, physical, and digital infrastructure, as well as the policies in place. **Method:** The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation studies. The data were analyzed using the SWOT analysis method to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the implementation of a Smart City in Lombok Tengah Regency. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the Lombok Tengah Regency Government has great potential to develop a Smart City, but there are still several challenges that need to be addressed. The readiness of the organizational structure and local government policies is quite good, but physical and digital infrastructure still needs to be improved. Additionally, social and economic disparities between regions also pose challenges in realizing an inclusive and sustainable Smart City. **Conclusion:** This study suggests that the Lombok Tengah Regency Government strengthens cooperation with various stakeholders, including the private sector and the community, to accelerate the development of the Smart City. Moreover, there is a need to increase human resource capacity and investment in digital infrastructure to support the implementation of the Smart City.

Keywords: Smart City, government readiness, Lombok Tengah, smart governance, SWOT analysis

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap Smart City. Smart City merupakan konsep yang mendorong pemerintah lokal untuk menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu mengevaluasi kesiapan struktur, infrastruktur, dan suprastruktur dalam mendukung implementasi Smart City. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam beralih menuju Smart City dengan mengkaji infrastruktur organisasi, fisik, dan digital, serta kebijakan yang ada. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi Smart City di Kabupaten Lombok Tengah. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan Smart City, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kesiapan struktur organisasi dan kebijakan pemerintah daerah cukup baik, namun infrastruktur fisik dan digital masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan Smart City yang inklusif dan berkelanjutan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mempercepat pengembangan Smart City. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur digital guna mendukung implementasi Smart City.

Kata Kunci: Smart City, kesiapan pemerintah, Lombok Tengah, smart governance, analisis SWOT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia sedang mengalami perubahan, setiap perubahan memiliki tujuan untuk meningkatkan keadaan negara. Oleh karena itu, negara-negara berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan secara holistik. Karena negara yang dapat bertahan adalah negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Perubahan yang dimaksud dalam hal ini lebih ditekankan pada penggunaan teknologi dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia. Dimulai dari daerah perkotaan, seperti manusia, ternyata tidak hanya manusia yang bisa pintar, tapi juga kota-kota. Kemudian hal ini disebut sebagai Smart City. Kota/Kabupaten menjadi lebih cerdas, karena pemerintah, bisnis, dan masyarakat semakin mengandalkan teknologi untuk mengatasi tantangan-tantangan dari urbanisasi yang cepat (Bappenas, 2021).

Apa yang membuat sebuah Smart City menjadi cerdas adalah penggunaan bersama sistem perangkat lunak, infrastruktur server, infrastruktur jaringan, dan perangkat klien untuk lebih baik menghubungkan tujuh komponen dan layanan infrastruktur kota yang kritis: administrasi kota, pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan publik, real estate, transportasi, dan utilitas (Kementerian PUPR, 2022).

Konsep Smart City mendorong pemerintah lokal dan tim teknologi mereka untuk lebih mengevaluasi teknologi-teknologi yang sedang muncul dan terlibat dengan para pemangku kepentingan utama di dalam dan di luar organisasi mereka. Untuk berhasil mewujudkan visi Smart

City, pemerintah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu Smart City, faktor-faktor utama yang mendorongnya, dan peran mereka dalam hal ini (Bappeda Lombok Tengah, 2024).

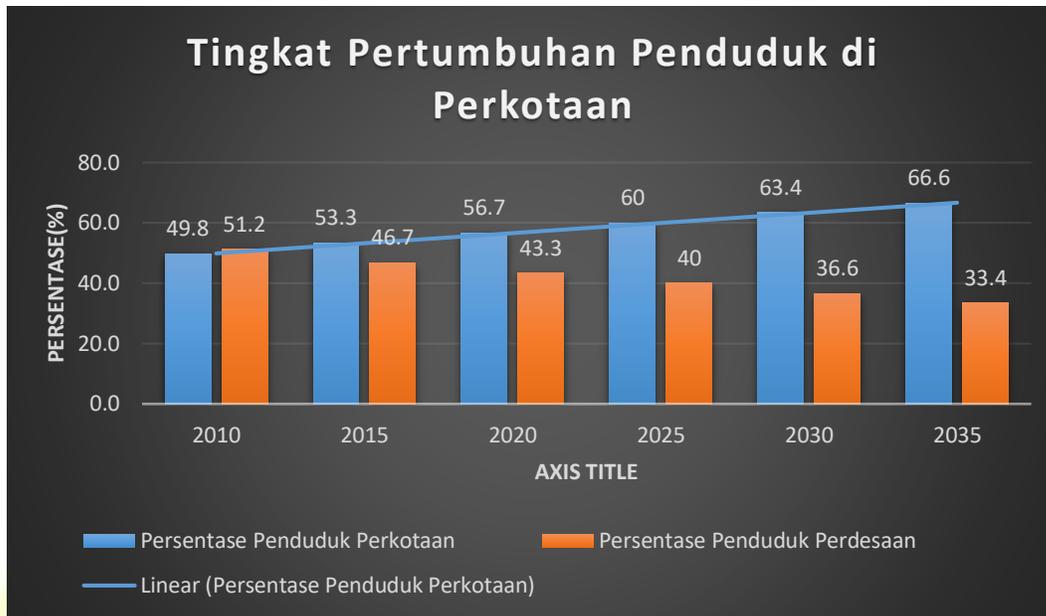
Permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota/kabupaten-kabupaten di Indonesia saat ini makin sulit dan makin kompleks, yang mana tidak lagi bisa menggunakan pendekatan yang biasa-biasa saja atau konvensional untuk penyelesaiannya. Dibutuhkan suatu pendekatan yang baru yang lebih menggunakan teknologi untuk pemecahan permasalahannya (proteknologi), terintegrasi, berkesinambungan (sustainable) dan lintas bidang/multidisiplin, supaya bisa menyelesaikan permasalahan kota/kabupaten yang semakin kompleks tersebut (Dutton, 2015).

Pendekatan Smart City yang saat ini banyak berkembang dan digunakan oleh kota-kota besar di dunia, memberikan pendekatan dan sudut pandang yang baru yang memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih baik dan komprehensif. Pendekatannya tidak hanya bersifat pemanfaatan teknologi dan bersifat sektoral, namun bisa menyoroti ke berbagai macam sektor dan memberikan tawaran pendekatan penyelesaian yang komprehensif dan lebih baik lagi. Di Indonesia, pendekatan Smart City dipelopori dan diadopsi oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, yang kemudian berkembang ke kota-kota/kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, melalui program Gerakan Menuju 100 Smart City yang melibatkan 100 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Selama tahun 2017 – 2019, telah dirumuskan sejumlah buku master plan Smart City sebagai langkah awal dalam penyusunan Smart City di 100 kota/kabupaten yang menjadi pioneer/percontohan Smart City di Indonesia. Pada tahun 2021, seiring dengan penetapan 10 destinasi wisata prioritas nasional dan ibukota negara baru, maka kemenkominfo berupaya untuk bisa memberikan kontribusi di dalam pengembangan daerah-daerah yang terkait dengan 10 destinasi wisata dan ibukota negara baru tersebut, termasuk di Kawasan Mandalika. Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam radius Kawasan Mandalika, kemudian terpilih menjadi bagian dari pengembangan Smart City terkait destinasi wisata (Kominfo, 2017).

Melalui manajemen jaringan digital untuk geografi daerah, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial, dan sistem lainnya, serta pemrosesan dan aplikasi digital dan informasional dari infrastruktur kabupaten dan lingkungan dasar, kita dapat mencapai manajemen perkotaan yang cerdas dan layanan yang lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih harmonis di kota-kota modern (Harris, 2016).

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari diberlakukannya hukum otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien dengan memberdayakan potensi setiap daerah. Melalui kebijakan ini, kesenjangan pembangunan yang disebabkan oleh birokrasi yang terlalu panjang dapat segera teratasi (Chourabi et al., 2012).

Data yang diperoleh dari BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2020 adalah sebesar 56,7%, dan pada tahun 2025 mencapai 60%. Oleh karena itu, diperkirakan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan hingga tahun 2045 akan mencapai 82,37%, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. Ini berarti bahwa lebih dari 50% dari penduduk Indonesia saat ini tinggal di kota-kota, sehingga perlakuan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah perkotaan dengan manajemen yang baik (Keenan, 2019).



Gambar 1.1

Pertumbuhan Penduduk di Perkotaan

Indonesia memiliki karakteristik regional yang berbeda, baik dalam hal budaya maupun ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam perencanaan smart governance, harus dipandu oleh kebutuhan, kondisi, visi, dan misi dari wilayah tersebut.

Perencanaan smart governance adalah ujung tombak dalam perencanaan Smart City. Karena Smart City dimulai dengan smart governance. tanpa smart governance, Smart City tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu, perencanaan smart governance harus merujuk pada konsep Smart City dan konsep perencanaan pemerintahan yang banyak dikembangkan dengan menggunakan kerangka kerja yang ada.

Seluruh konsep Smart City terdiri dari 6 dimensi pembentuk, yaitu smart governance, smart environment, smart living, smart people, smart mobility, dan Smart Economy.

Smart Governance adalah salah satu aspek fundamental yang harus terpenuhi untuk mencapai visi Smart City. Secara umum, konsep Smart Governance mengacu pada penggunaan yang efektif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menyediakan layanan publik di sektor pemerintahan. Smart City, selain mengurus administrasi pemerintahan, juga menangani berbagai layanan seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lainnya.

Dari data yang ada, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum memulai program bantuan teknis bagi pejabat pemerintahan sehingga kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan program Smart City berbasis teknologi masih sangat minim. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan teknologi, masih sangat terbatas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam merealisasikan program Smart City, karena program ini harus dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintahan kota, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen Smart society dan smart economy. Namun, karena program ini baru berjalan selama satu tahun, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang "Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Menuju Smart City."

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini berfokus pada kesenjangan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya kompetensi dan kualifikasi SDM yang ada. Data dari LAKIP 2022 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berpendidikan SLTA, dengan hanya sedikit yang memiliki kualifikasi S-2 atau S-1. Kesenjangan ini menciptakan hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan manajemen di Sekretariat DPRD. Pegawai yang kurang terampil dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai sering kali kesulitan dalam mengadaptasi prosedur baru dan teknologi, yang berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

Selain masalah kualifikasi, penelitian ini juga menyoroti masalah jumlah SDM yang terbatas dan kurangnya tenaga kerja yang berpengalaman. Banyak pegawai yang sudah berusia tua atau tidak memiliki kemampuan yang relevan dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tidak merata dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Kesenjangan antara kebutuhan organisasi dan kapasitas pegawai ini menghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi internal menunjukkan bahwa tanpa peningkatan dalam jumlah dan kualitas SDM, Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat akan terus mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi adanya kurangnya dukungan teknis dan administratif dari Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Lahat. Hal ini mencakup dukungan dalam bentuk pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan sumber daya yang memadai. Tanpa adanya dukungan yang memadai, anggota DPRD tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi dengan efektif. Kesenjangan dalam dukungan ini memperlihatkan bahwa Sekretariat DPRD belum sepenuhnya berfungsi sebagai supporting system yang diharapkan dalam RPJPD dan RPJMD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan strategi dan solusi yang dapat mengatasi kesenjangan tersebut, serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai implementasi konsep Smart City di berbagai kota di Indonesia menunjukkan berbagai hasil yang menarik. Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman dalam jurnal tahun 2019 mengkaji konsep kota cerdas sebagai solusi alternatif untuk masalah perkotaan di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa penerapan konsep Smart City mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan kota. Penelitian ini menekankan empat pilar pembangunan yaitu pengguna, mekanisme dan standar pelayanan, infrastruktur ICT, dan struktur kelembagaan. Persamaan dengan penelitian lainnya adalah fokus pada kota cerdas di Indonesia, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep dan peran Smart City dalam tata kelola pemerintahan yang cerdas (Hasibuan & Sulaiman, 2019).

Ni Luh Wawan Artha Sari dalam jurnal tahun 2023 menganalisis tingkat kesiapan Smart City di Kabupaten Karangasem menggunakan metode wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan Karangasem dalam mempersiapkan kota pintar berada pada indeks 75%, yang dikategorikan pada level scattered. Hal ini berarti bahwa lingkungan di Karangasem telah lebih baik dan layanan berbasis TIK telah direncanakan dengan baik. Persamaan dengan penelitian lain adalah analisis implementasi model kota cerdas oleh entitas pemerintah daerah, namun penelitian ini fokus pada tingkat kesiapan menggunakan indeks Smart Readiness(Sari, 2023).

Annisa Alya Rahmawati dan Rino Ardhian dalam jurnal tahun 2023 meneliti kinerja perangkat daerah Kota Surakarta terhadap implementasi Smart City melalui model Garuda Smart City. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% perangkat daerah di Kota Surakarta telah mencapai level kematangan Smart City antara integrated dan smart. Sebanyak 15% berada di level integrated, dan 4% berada di antara level scattered dan integrated.

Persamaan dengan penelitian lainnya adalah analisis kinerja entitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan model Smart City, sementara perbedaannya terletak pada penggunaan model GSCM(Rahmawati & Ardhian, 2023).

Putra Utama, Akiong Manishe, dan K. Andreswari dalam jurnal JSAI tahun 2023 meneliti tingkat kesiapan Kota Bengkulu menuju Smart City menggunakan model e-readiness. Penelitian ini mengukur faktor-faktor seperti awareness, governance, commitment, human resources, technological resources, dan business resources. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan Kota Bengkulu rata-rata berada pada tingkat “siap” menuju Smart City dengan komitmen sebagai faktor yang paling berpengaruh. Persamaan dengan penelitian lain adalah fokus pada kesiapan internal pemerintah kota, namun penelitian ini menggunakan model e-readiness yang berbeda(Utama et al, 2023).

Fahrina A. dalam jurnal JATISI tahun 2022 menganalisis kesiapan pembangunan Smart City di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui focus group discussion dan dokumen resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung memiliki kesiapan yang cukup baik, meskipun ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Persamaan dengan penelitian lain adalah analisis kesiapan pemerintah daerah menuju Smart City, sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data yang lebih intensif(Fahrina, 2022).

Bonde D. A., Priyo Purnomo, dan Salsabila L. dalam jurnal tahun 2020 meneliti kesiapan Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Smart City. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai artikel, jurnal, dokumen, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kotamobagu memiliki tingkat kesiapan yang cukup tinggi, mencapai 80%. Persamaan dengan penelitian lain adalah fokus pada kesiapan pemerintah daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan sumber data yang lebih beragam(Bonde et al, 2020).

Sartika I. dalam jurnal tahun 2023 meneliti kesiapan Kota Banjarmasin menuju Smart City. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Banjarmasin berada dalam kategori siap (madya) menuju siap dan mampu bersaing (utama). Faktor-faktor yang dapat mempercepat terwujudnya Banjarmasin Smart City termasuk pusat data yang terintegrasi dan perencanaan kota yang ramah lingkungan. Persamaan dengan penelitian lain adalah fokus pada kesiapan pemerintah daerah, sementara perbedaannya terletak pada analisis yang lebih rinci mengenai faktor-faktor percepatan implementasi(Sartika, 2023).

1.4 PernyataanKebaruanIlmiah

Pernyataankebaruanilmiahdalam penelitianiniterletak pada pendekatanholistik yang digunakanuntukmenilai kesiapanpemerintahkabupatendalam mengimplementasikan konsep Smart City. Meskipunpenelitianterdahulutelah banyakmembahasimplementasi Smart City di berbagaidaerah, penelitianinimemperkenalkan model evaluasi yang lebihkomprehensifdenganmempertimbangkanberbagaidimensikesiapan, termasukteknologi, infrastruktur, kebijakan, dan partisipasimasyarakat. Pendekataninimemberikanpandangan yang lebihmenyeluruh dan mendalamtentangsejauh mana kesiapanpemerintahkabupatendalam membangun Smart City, sesuatu yang belumbanyakdijelajahdalam penelitiansebelumnya.

Selain itu, penelitianinimenggunakanmetodologi mixed-method yang menggabungkanpendekatankuantitatif dan kualitatifuntukmemberikanhasil yang lebih robust dan valid. Dalam penelitianini, data kuantitatifdikumpulkanmelaluisurvei dan analisisstatistik, sementara data kualitatifdiperolehmelaluiwawancaramendalam dengan para pemangkukepentingan. Penggabunganmetodeinimungkinkanpenelitiuntukmengidentifikasitidak hanyatingkatkesiapanpe merintahkabupaten, tetapi juga faktor-faktorkontekstual yang mempengaruhikesiapantersebut. Ini adalahlangkahmajudaripenelitiansebelumnya yang cenderungfokus pada satuaspeksaja.

Penelitianini juga menyorotipentingnyaevaluasi berkelanjutan dan adaptasikebijakandalampengembangan Smart City. Denganmengidentifikasihambatan dan peluang yang spesifik di setiapkabupaten, penelitianinimemberikanrekomendasipraktis yang dapatlangsungditerapkan oleh pemerintahdaerah. Kebaruan lain daripenelitianiniadalahpenggunaan teknologianalitik yang canggihuntukmemproses dan menganalisis data, termasukpenggunaan software analitikuntukmengidentifikasitren dan pola yang mungkitidakterlihatdenganmetodeanalisis tradisional.

Terakhir, penelitianinimemberikan kontribusibarudalam literaturtentang Smart City denganfokus khusus pada daerah-daerah yang memilikisumberdayaterbatas. Penelitianinimengungkapkanbahwadengan strategi yang tepat dan adaptasikebijakan yang inovatif, daerahdenganketerbatasan sumberdaya pun dapatmemulailangkahmenuju Smart City. Temuanini sangat relevanbagibanyakdaerah di Indonesia yang menghadapitantanganserupa, sehinggamemberikannilaipraktis yang tinggibagi para pembuatkebijakan dan praktisi di lapangan.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitianiniadalahuntukmengevaluaisejauh mana kesiapanPemerintahKabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan konsep Smart City, denganfokus pada kemampuan dan kesiapanstruktur, infrastruktur, dan suprastrukturpemerintahdalam mendukung transformasimenujukotapintar. Penelitianini juga bertujuan untuk mengidentifikasitanganutama yang dihadapisertapotensi yang dimiliki oleh pemerintahdaerahdalam mengatasi keterbatasan sumberdaya, sehinggadapatmemberikanrekomendasistrategis untuk mempercepat pengembangan Smart City yang efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengertian dari penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2010:4). Proses penelitian ini melibatkan upaya yang penting seperti mengajukan berbagai pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data serta menafsirkan data. Pada metode kualitatif, data yang digunakan merupakan pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber.

Selanjutnya pengertian metode deskriptif ini adalah peneliti menjelaskan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan (Sugiyono, 2019:19). Mereka baru mengenal hanya sebatas terhadap informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh cukup banyak, belum tersusun dengan jelas dan bervariasi. Pada metode deskriptif ini data yang disusun adalah gambaran dari keadaan yang sebenarnya terjadi pada fokus masalah yang sedang diteliti.

Kemudian untuk mendukung metode kualitatif yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Maksudnya adalah memungkinkan temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema yang dominan dan signifikan ada di dalam data, tanpa mengabaikan berbagai hal yang muncul oleh struktur metodologisnya (Moleong, 2013:289). Maksud dari pendekatan induktif ini adalah pengumpulan data yang berawal dari khusus menuju umum. Konsep ini secara jelas dilakukan untuk menggambarkan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi.

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh penulis menggunakan metode purposive sampling dan accidental sampling. Metode accidental sampling dipilih karena hemat tenaga dan dana bagi peneliti. Sedangkan, metode purposive sampling digunakan untuk memastikan informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap paling tahu mengenai Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat diharapkan menghasilkan informasi dan data yang lengkap. Informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah (1 orang, kode I1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (1 orang, kode I2), Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah (1 orang, kode I3), Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah (1 orang, kode I4), dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah (7 orang, kode I5), dengan total keseluruhan 11 informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tren menuju Smart City di Lombok Tengah

Pembangunan kota dalam konteks masa kini dan masa depan telah mengalami transformasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perubahan krusial adalah bahwa pembangunan kota harus bergerak menuju konsep kota pintar. Konsep kota pintar tidak hanya berkaitan dengan tingkat kecanggihan teknologi informasi, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Dengan kata lain, konsep kota pintar bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan produktivitas sehingga kota dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang cerdas.

Kota pintar berupaya untuk mencapai keberlanjutan dalam beberapa aspek kunci, termasuk ekonomi yang cerdas, sumber daya manusia yang cerdas, pemerintahan yang cerdas, mobilitas yang cerdas, dan perumahan yang cerdas. Konsep ekonomi cerdas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN (2021-2026) mencakup beberapa inisiatif, antara lain:

1. Branding Kota: Mencakup pengembangan produk unggulan, pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta penonjolan karakter sosial dan budaya kota sebagai bagian dari strategi branding untuk meningkatkan citra dan daya tarik kota.
2. E-Business: Melibatkan pengembangan peran sistem informasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kota. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses pasar, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor industri.
3. Peningkatan Kemampuan Inovasi SDM dan Kewirausahaan: Mendorong pengembangan kemampuan inovasi dan kewirausahaan di kalangan sumber daya manusia, sehingga kota dapat menjadi pusat inovasi yang berkembang dan menghasilkan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi.
4. Elektronifikasi: Menggeser transaksi manual menuju transaksi online, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis serta meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Dalam menerapkan tren menuju kota pintar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan OPD yang ada dan para pemimpin regional yaitu Bupati Kabupaten Lombok Tengah.

3.2 Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Menuju Smart City

Tingkat kesiapan adalah pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan suatu kota. Definisi "kesiapan" menunjukkan kemungkinan perbedaan antara "siap", "belum siap", dan "tidak siap" untuk suatu kota. Tata kelola cerdas atau tata kelola kota cerdas adalah konsep serta praktik bagaimana cara mengelola manajemen dan pelayanan publik lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi terintegrasi. Salah satu karakteristik Tata Kelola Cerdas adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan pelayanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, dan komunikatif, serta efisien dalam waktu, biaya, dan upaya.

Smart Governance direkomendasikan sebagai dasar untuk pengembangan dimensi lain dari Smart City yang berhasil. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya untuk mewujudkan Kota Cerdas melalui tata kelola cerdas dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Salah satunya adalah pengaturan koordinasi untuk semua OPD terkait dengan program kota cerdas melalui tata kelola cerdas baik melalui kinerja terstruktur maupun melalui komunikasi dan teknologi internet sebagai wujud dari tata kelola cerdas dalam mewujudkan kota cerdas. Mencapai tujuan program kota cerdas memerlukan persiapan dari pemerintah kabupaten Lombok Tengah. Faktor tata kelola cerdas merupakan dukungan penting untuk mewujudkan kesiapan pemerintah kabupaten Lombok Tengah menuju kota cerdas, namun masih menghadapi hambatan. Menurut Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju 100 Smart City, yang digunakan sebagai konsep atau metode awal yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kematangan kesiapan kota cerdas yang memiliki 3 indikator, yaitu Struktur (Sumber Daya Manusia), Infrastruktur (TIK) Suprastruktur (Kebijakan). Teori ini digunakan oleh peneliti dalam membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuju Kota Cerdas yang berkorelasi dengan data dan fakta yang ada.

3.3 Analisis Kesiapan Struktur

Dalam analisis kesiapan struktur pada tingkat daerah, terfokus pada komponen Struktur, yang mencakup evaluasi terhadap tiga aspek utama: Kualitas SDM daerah dengan 9 indikator, Kualitas Sumber Daya Pemerintahan dengan 20 indikator, dan Kapasitas Keuangan Daerah dengan 9 indikator.

1. Analisis Kualitas SDM Daerah

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam bidang kreativitas, teknologi, dan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya komunitas minat bakat, kehadiran komunitas pengembang TIK, dan dukungan pendidikan yang signifikan. Namun, tantangan serius ditemukan dalam aspek keamanan dan ketertiban, seperti tingginya jumlah pelanggaran ketertiban umum, angka kriminalitas, dan perusakan fasilitas umum. Ketiadaan digital startup juga menunjukkan kebutuhan akan dukungan lebih lanjut untuk pengembangan kewirausahaan digital.

2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Kabupaten Lombok Tengah memiliki infrastruktur teknologi yang cukup baik dalam beberapa aspek, seperti ketersediaan jaringan broadband, LAN/WAN, dan beberapa sistem informasi yang mendukung operasional pemerintahan. Namun, terdapat juga sejumlah kelemahan signifikan, terutama dalam hal ketiadaan relawan TIK, mitigasi bencana data, dan interoperabilitas sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan legislasi. Untuk mengoptimalkan pengembangan SDM dan infrastruktur teknologi, diperlukan peningkatan dalam dukungan pendidikan teknologi, pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, dan peningkatan kapasitas data center serta rencana mitigasi bencana.

3. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis kapasitas keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa secara umum daerah ini memiliki kondisi keuangan yang baik. Persentase pendapatan asli daerah yang mencapai 10%, nilai SILPA yang besar, dan tingginya nilai investasi masuk menunjukkan stabilitas dan potensi pertumbuhan ekonomi. Komitmen terhadap pengembangan smart city juga terlihat dari alokasi anggaran yang meningkat.

Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti persentase belanja infrastruktur yang masih rendah dan jumlah program pembangunan smart city yang masih terbatas. Untuk mempercepat pengembangan smart city dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diperlukan peningkatan dalam alokasi anggaran untuk infrastruktur dan program-program yang mendukung transformasi digital. Diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran juga harus terus dioptimalkan.

3.4 Analisis Kesiapan Infrastruktur

Dalam analisis kesiapan daerah pada elemen penggerak infrastruktur. Dalam analisis tersebut, terdapat penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu Analisis Infrastruktur Fisik daerah dengan 8 indikator, Analisis Infrastruktur Digital Daerah dengan 7 indikator, dan Analisis Infrastruktur Sosial Daerah dengan 5 indikator.

1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Infrastruktur fisik di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa daerah ini memiliki beberapa komponen infrastruktur yang kuat, seperti kondisi jalan yang baik (75,79%) dan sarana prasarana kesehatan yang cukup memadai (90%). Adanya kawasan perkantoran dan perbelanjaan juga menandakan dukungan yang baik untuk aktivitas bisnis dan perdagangan.

Namun, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal fasilitas pejalan kaki, lampu jalan, rambu dan petunjuk jalan, serta sarana prasarana pendidikan. Peningkatan infrastruktur ini penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat.

2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur digital di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hasil yang sangat positif. Hampir semua komponen dinilai dalam kondisi baik, mencerminkan kesiapan yang tinggi dalam hal infrastruktur digital.

3. Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hasil yang sangat positif. Semua komponen dinilai dalam kondisi baik, mencerminkan kesiapan sosial yang tinggi di daerah ini.

3.5 Analisis Kesiapan Suprastruktur

Dalam penilaian kesiapan daerah pada komponen penggerak Suprastruktur, fokus diberikan pada tiga aspek utama: Analisis Kebijakan Daerah dengan 7 indikator, Analisis Kelembagaan Daerah dengan 4 indikator, dan Analisis Organisasi Masyarakat Daerah dengan 6 indikator.

1. Analisis Kebijakan Daerah

Analisis kesiapan kebijakan daerah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hasil yang sangat positif. Semua komponen kebijakan dinilai dalam kondisi baik, yang mencerminkan kesiapan yang tinggi dalam mendukung pengembangan smart city.

2. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

Secara keseluruhan, Kabupaten Lombok Tengah memiliki kelembagaan yang sangat mendukung pengembangan smart city.

3. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

Meskipun ada partisipasi dari lembaga pengabdian masyarakat dan pakar dari perguruan tinggi lokal, namun kurangnya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city serta dukungan operasional pemerintah terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan.

3.6 Perhitungan Tingkat Kesiapan

Berikut merupakan tabel hasil analisis seluruh dimensi yang dinilai menggunakan analisis kesiapan daerah/ smart readiness (kominfo,2017):

Tabel Perhitungan Tingkat Kesiapan

DIMENSI	INDIKATOR	Indicator Value	Maximum Value
Struktur (Sumber Daya Manusia)	SDM Daerah	7	18
	Sumber daya pemerintah daerah.	25	40
	Kapasitas keuangan daerah	18	18
Infrastruktur (TIK)	Infrastruktur fisik	12	16

	Infrastruktur digital	14	14
	infrastruktur sosial	10	10
Suprastruktur (Kebijakan)	Kebijakan Daerah	14	14
	Kelembagaan Daerah	8	8
	Organisasi Masyarakat	4	12
Total		112	150

Maka dari hasil perhitungan dari tabel tersebut, telah didapatkan nilai Total Indicators Value nya sebesar, dan Total Maximum Value.

3.7 Analisis Kesenjangan

Juga dikenal sebagai "Gap analisis", digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini ("as is") dan kondisi masa depan ("to be" atau "keadaan masa depan"). Selanjutnya, kesenjangan tersebut digunakan sebagai referensi untuk menentukan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan yang teridentifikasi.

Analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa yang akan datang menunjukkan beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan visi masa depan yang diinginkan. Strategi dan program kerja yang disusun secara terperinci menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan mengarahkan Kabupaten Lombok Tengah menuju masa depan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

3.8 Analisis SWOT Smart City Kabupaten Lombok Tengah

Metodologi yang berguna dalam perencanaan strategis pengembangan Smart City adalah Analisis SWOT, yang mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Proses ini memungkinkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan proyek. Langkah selanjutnya adalah merumuskan langkah-langkah strategis yang memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahan, dan menghadapi ancaman dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.

Kekuatan merujuk pada kondisi internal yang mendukung kesuksesan dalam program kerja atau proyek Smart City, seperti kepemilikan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi, serta pengalaman dan kebijakan yang konsisten. Kelemahan, di sisi lain, adalah faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Smart City, seperti ketidakterdediaan kebijakan, kompetensi SDM, atau infrastruktur dasar, dan resistensi terhadap perubahan. Peluang mencakup kondisi eksternal yang mendukung pengembangan Smart City, seperti minat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi masyarakat, sementara ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat pengembangan Smart City, seperti perubahan iklim, bencana alam, atau tantangan dalam penerapan teknologi. Analisis SWOT terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi pengembangan Smart City.

Analisis SWOT Kabupaten Lombok Tengah dalam konteks pengembangan Smart City menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya menuju ke arah tersebut.

Dari segi kekuatan internal, Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, didukung oleh status KEK Mandalika, event Moto GP, dan Bandara Internasional Lombok. Namun, kelemahan seperti kurangnya SDM dalam bidang IT dan masalah infrastruktur telekomunikasi membatasi kemampuan daerah untuk meraih potensi secara maksimal.

Sementara itu, dari sisi eksternal, terdapat peluang yang signifikan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta peran penting Bandara Internasional Lombok sebagai pintu masuk utama bagi wisatawan. Namun, adanya ancaman dari masuknya pengaruh budaya asing yang tidak terkontrol dan persaingan bisnis pariwisata yang semakin ketat melalui digital menunjukkan tantangan yang harus dihadapi.

Strategi yang diusulkan mencakup penguatan kerjasama dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi wisata. Peningkatan SDM di bidang IT dan perbaikan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi fokus untuk mengatasi kelemahan internal yang ada.

Dengan demikian, hasil analisis SWOT ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengembangkan konsep Smart City, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata unggulan.

Analisis SWOT untuk Dimensi Smart Governance di Kabupaten Lombok Tengah memberikan gambaran yang holistik tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menerapkan konsep Smart City dalam tata kelola pemerintahan.

Kekuatan internal yang signifikan meliputi komitmen kuat dari Kepala Daerah terhadap implementasi Smart City, serta adopsi inovatif dalam pelayanan publik melalui platform digital seperti WhatsApp, email, dan layanan terpadu satu pintu. Selain itu, sebagian besar dinas sudah terkoneksi dengan internet dan telah ada pelayanan E-SMART yang tersedia.

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan internal yang menjadi hambatan, seperti keterbatasan jaringan internet yang belum merata di seluruh kabupaten, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM TIK, serta infrastruktur digital yang belum memadai dengan masih adanya desa blank spot dan OPD yang belum terkoneksi. Selain itu, masalah integrasi data juga menjadi tantangan, terutama dalam konteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari segi peluang eksternal, terdapat dukungan dari program Smart City Kawasan Kabupaten Lombok Tengah, serta dorongan untuk menerapkan digitalisasi layanan publik dan administrasi di dinas-dinas. Dukungan dari Satu Data Indonesia dan izin penggunaan cloud computing nasional juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data.

Strategi yang dapat diambil berdasarkan analisis ini mencakup pengembangan digitalisasi layanan publik, integrasi data antar-OPD, penguatan kompetensi ASN melalui program daring, dan pengembangan master plan Smart City. Ancaman seperti tuntutan peningkatan kualitas layanan berbasis TIK dari masyarakat, kenaikan harga teknologi, dan keterbatasan APBD dapat diatasi melalui strategi yang mencakup kajian ROI terhadap teknologi partisipasi masyarakat, penetapan prioritas pengadaan teknologi sesuai APBD, dan pengembangan sarana penyampaian layanan publik serta kebijakan yang mengatur TI.

3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, temuan mengenai kesiapan Kabupaten Lombok Tengah menuju konsep Smart City menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Sebagai contoh, studi oleh Nugroho dan Wulandari (2022) mengidentifikasi bahwa banyak kota di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur digital dan tata kelola cerdas. Namun, Lombok Tengah menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam kesiapan infrastruktur digital dan suprastruktur kebijakan. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun ada kemajuan, beberapa aspek seperti kapasitas keuangan dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Rachman dan Lestari (2021) yang menyoroti pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang efektif untuk mendukung transformasi digital.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Santosa dan Wijayanti (2020), menunjukkan bahwa Lombok Tengah telah menerapkan beberapa strategi baru dalam branding kota dan e-business yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kota-kota lain yang masih berada pada tahap awal implementasi Smart City. Keberhasilan Lombok Tengah dalam pengembangan sistem informasi dan pengelolaan teknologi informasi yang lebih baik memberikan indikasi bahwa daerah ini memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang cerdas dan produktif. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Soetomo dan Yulianto (2019), Lombok Tengah masih perlu meningkatkan dukungan untuk kewirausahaan digital dan mitigasi risiko bencana data agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Selanjutnya, analisis kesenjangan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa Lombok Tengah perlu mengatasi beberapa kekurangan yang teridentifikasi dalam kapasitas keuangan dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Putra dan Dewi (2023) menunjukkan bahwa banyak daerah mengalami kesulitan dalam diversifikasi sumber pendanaan dan optimalisasi anggaran untuk program smart city. Lombok Tengah, meskipun memiliki anggaran yang memadai, perlu fokus pada peningkatan alokasi untuk infrastruktur dan program-program yang mendukung transformasi digital secara lebih menyeluruh. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan yang ada dan mempercepat pencapaian visi Smart City di masa depan.

3.10 Diskusi Temuan Menarik

Dalam penelitian ini, beberapa faktor penghambat signifikan telah diidentifikasi dalam upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuju implementasi Smart City. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan adalah ketiadaan infrastruktur digital yang memadai, seperti kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan mitigasi bencana data yang tidak optimal. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya infrastruktur digital yang kuat sebagai fondasi bagi kota pintar. Penelitian oleh Santosa dan Wahyudi (2020) menekankan bahwa ketidakcukupan infrastruktur digital dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan smart city. Selain itu, kurangnya dukungan dari relawan teknologi informasi dan rendahnya tingkat inovasi dalam pengembangan start-up digital menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung.

Faktor lain yang ditemukan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan smart city. Meskipun terdapat beberapa forum komunitas dan dukungan dari lembaga pengabdian masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program smart city masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Yuliana dan Rahman (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat keberhasilan proyek smart city, karena kurangnya pemahaman dan dukungan lokal dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi

pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program sosialisasi yang lebih intensif dan pengembangan platform yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi smart city.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuju Smart City, dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan sudah cukup baik dengan dukungan organisasi yang memadai, meskipun koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Infrastruktur fisik dan digital masih belum memadai, sehingga investasi lebih lanjut dalam TIK dan jaringan internet diperlukan. Kebijakan dan regulasi yang ada cukup mendasar, tetapi memerlukan penyempurnaan untuk implementasi efektif. Dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, sangat penting. Kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah menjadi hambatan, sehingga perlu diatasi dalam strategi pengembangan Smart City. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan pada komitmen pemerintah dan potensi sumber daya alam, sementara keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kelemahan. Peluang meliputi dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi dengan sektor swasta, sedangkan ancaman termasuk kesenjangan digital dan resistensi masyarakat terhadap perubahan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan dalam analisis kesiapan smart city sebagian besar bersifat sekunder dan berasal dari laporan serta dokumen pemerintah, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini dan real-time. Kedua, keterbatasan geografis dalam pengumpulan data lapangan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam tentang faktor lokal yang spesifik dan dinamis. Ketiga, penelitian ini juga menghadapi keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya, yang membatasi kemampuan untuk melakukan survei langsung dan wawancara mendalam dengan semua pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, hasil temuan mungkin tidak sepenuhnya representatif dan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut melalui studi lebih mendalam dan evaluasi lapangan yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Arah masa depan penelitian ini dapat melibatkan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai implementasi dan evaluasi program smart city di Kabupaten Lombok Tengah dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Penelitian lanjutan bisa fokus pada studi kasus spesifik untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, serta mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan. Selain itu, penting untuk melakukan survei dan wawancara langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dan terkini. Penelitian kedepan juga dapat mengeksplorasi inovasi teknologi terbaru dan metode pengembangan kota pintar yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kesiapan dan keberhasilan smart city di daerah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,

bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2026. Jakarta: Bappenas.
- Bappeda Lombok Tengah. (2024). Laporan Evaluasi Kesiapan Smart City Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah: Bappeda.
- Bonde, D. A., Purnomo, P., & Salsabila, L. (2020). Kesiapan Kota Kotamobagudalam Mewujudkan Smart City. *Jurnal*.
- Chourabi, H., et al. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. *Proceedings of the 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2289-2297.
- Dutton, W. H. (2015). *The Role of Technology in Urban Development*. Oxford University Press.
- Fahrina, A. (2022). Kesiapan Pembangunan Smart City di Kabupaten Temanggung. *JATISI*.
- Gordon, D. F., & Morrison, P. (2018). Implementing Smart City Technologies: Challenges and Opportunities. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 65(4), 518-528.
- Harris, R. (2016). *Smart Cities: A Comprehensive Guide to Urban Innovation*. New York: Routledge.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). Konsep Kota Cerdas sebagai Solusi Alternatif untuk Masalah Perkotaan di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal*.
- Keenan, J. (2019). *Smart Cities: A Global Perspective*. London: Palgrave Macmillan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). *Pembangunan Infrastruktur untuk Smart City di Indonesia*. Jakarta: PUPR.
- Kominfo. (2017). *Panduan Penyusunan Masterplan Smart City: Gerakan Menuju 100 Smart City*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Rahmawati, A. A., & Ardhian, R. (2023). Kinerja Perangkat Daerah Kota Surakarta terhadap Implementasi Smart City melalui Model Garuda Smart City. *Jurnal*.
- Sari, N. L. W. A. (2023). Analisis Tingkat Kesiapan Smart City di Kabupaten Karangasem. *Jurnal*.
- Sartika, I. (2023). Kesiapan Kota Banjarmasin Menuju Smart City. *Jurnal*.
- Utama, P., Manishe, A., & Andreswari, K. (2023). Tingkat Kesiapan Kota Bengkulu Menuju Smart City Menggunakan Model e-Readiness. *JSAI*.